

---

# Peran *Amnesty International* Sebagai Aktor Transnasional dalam Upaya Menghentikan Proyek *Dakota Access Pipeline* (DAPL)

Nadya Selma Karamy, International Relations, Faculty of Social and Political Science, Muhammadiyah University of Yogyakarta, Indonesia.

## **Abstract**

This journal thesis will explain how Amnesty International as a transnational actor will stop the Dakota Access Pipeline Project (DAPL). DAPL is a pipeline route built by gas and oil company with the name Energy Transfers (ET). ET planned DAPL will be 1.886 km long when finished and will cross North Dakota, South Dakota, Iowa and Illinois. Conflict arose when this route is shown to the public because Dakota state is home for the indigenous people of America, Standing Rock Sioux tribe. DAPL will take their land and if the pipeline leaked, their water source will be at risk for being contaminated. The tribe said that if this pipeline continues, it means that the federal government will break the Fort Laramie Treaty that ensure the indigenous people living in the reservation can live there peacefully without any disturbance. Furthermore, if the pipeline continues to build it means that the basic human rights of the indigenous to have water and decent life is violated. The construction of DAPL itself has violated many human rights such as the right for peaceful protest and it makes human rights based NGO to flare up. Amnesty International as a human rights NGO is also getting involved with this project. This journal will explain how Amnesty International mobilize local community and the public to aware about violation of human rights with empowerment at the grassroots theory and how AI is a human right based NGO that have the power to build discourse with Barnett and Duvall's productive power.

## **Abstrak**

Karya tulis ini menjelaskan mengenai bagaimana Amnesty International sebagai aktor transnasional berupaya untuk menghentikan proyek Dakota Access Pipeline (DAPL). DAPL adalah jalur pipa yang dibangun oleh perusahaan minyak dan gas yang bernama *Energy Transfers* (ET). ET berencana membangun DAPL yang jika selesai akan memiliki panjang 1.886 km dan melewati 4 negara bagian yaitu Dakota Utara, Dakota Selatan, Iowa dan Illinois. Permasalahan muncul ketika rute ini diungkapkan ke publik karena negara bagian Dakota merupakan tempat tinggal masyarakat asli Amerika, *Standing Rock Sioux tribes*. Suku Standing Rock mengatakan bahwa DAPL akan mengambil lahan milik mereka dan membuat sumber air minum mereka berisiko terkena cemaran jika jalur pipa DAPL rusak. Mereka beranggapan bahwa jika konstruksi pipa ini dilanjutkan artinya pemerintah Amerika Serikat akan melanggar perjanjian *Fort Laramie Treaty 1868* yang menjamin bahwa suku Indiana dapat tinggal di tanah reservasi tanpa terganggu. Selain itu, dilanjutkannya rute DAPL artinya melanggar HAM masyarakat adat untuk mendapatkan air bersih dan

kehidupan yang layak. Pada proses konstruksi DAPL, banyak terjadi pelanggaran HAM yang membuat marah para NGO berbasis hak asasi manusia seperti *Amnesty International* (AI). Skripsi ini akan menjelaskan bagaimana AI memobilisasi komunitas lokal dan publik untuk menyadari akan pelanggaran HAM yang terjadi di proyek DAPL dengan menggunakan teori *empowerment at the grassroots* dan bagaimana AI adalah organisasi berbasis HAM yang sangat berpengaruh sehingga mampu membangun suatu wacana dengan menggunakan teori *productive power* milik Barnett dan Duvall

**Kata kunci:** organisasi non-pemerintah, hak asasi manusia, Amnesty International, Dakota Access Pipeline.

---

## PENDAHULUAN

Terhitung dari tahun 1970, INGO mendalami aktivitas mereka dalam membela hukum tentang Hak Asasi Manusia. Menurut diplomat Soviet pada tahun 1969, sebagai *'weeds in the field'*, aktivitas INGO adalah permulaan untuk mendapatkan perubahan yang signifikan dalam hubungan *state-society* secara global (Forsythe, 2012). Karya tulis ini akan memfokuskan pada Amnesty International (AI) sebagai subjek pada penelitian ini, AI dipilih dalam karya tulis ini karena AI merupakan salah satu *leading NGO* berbasis hak asasi manusia yang sangat berpengaruh dalam politik internasional. Selain itu, dalam kasus yang diambil oleh penulis kali ini, yaitu *Dakota Access Pipeline* (DAPL) AI merupakan organisasi yang paling vokal dalam menyuarakan pelanggaran HAM yang terjadi pada saat konstruksi rute pipa DAPL ini dibuat.

Amnesty International sebagai aktor transnasional berupaya untuk menghentikan proyek *Dakota Access Pipeline* (DAPL). DAPL adalah jalur pipa yang dibangun oleh perusahaan minyak dan gas yang bernama *Energy Transfers* (ET) pada tahun 2016. ET berencana membangun DAPL yang jika selesai akan memiliki panjang 1.886 km dan melewati 4 negara bagian yaitu Dakota Utara, Dakota Selatan, Iowa dan Illinois. (Levin, *Dakota Access pipeline: the who, what and why of the Standing Rock protests*, 2017). Para pendukung proyek ini berpendapat bahwa jika produsen minyak dihentikan, itu akan tidak berguna karena juga sudah banyak produksi minyak yang dilakukan di Dakota Utara-argumen yang sama dengan *Keystone XL* yang mereka berikan kepada publik. *Energy Transfer Partners*, perusahaan di balik pembangunan proyek tersebut, mengatakan penyaluran minyak lewat pipa lebih aman dibanding mengangkutnya dengan kereta api atau melalui kendaraan. Mereka juga mengatakan pembangunan pipa ini juga akan meningkatkan

ekonomi setempat. Sebagaimana Dakota Utara memang menjadi negara bagian Amerika Serikat dengan tingkat ekonomi paling rendah dan angka pengangguran yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara bagian lainnya.

Sedangkan bagi para oposisi, pembangunan jalur pipa Dakota Access Pipeline bukan merupakan usaha untuk meningkatkan perekonomian melainkan hanyalah usaha korporasi untuk memperkaya diri mereka sendiri. *United States Army Corps of Engineer (USACE)* merupakan badan pemerintah yang salah satu tugasnya adalah melakukan tinjauan lingkungan terhadap seluruh infrastruktur dan atau bangunan yang akan dibangun di negara perserikatan Amerika Serikat. Dalam pembangunan jalur pipa DAPL ini, USACE juga melakukan tinjauan lingkungan dan dengan cepat memberikan izin untuk melanjutkan pembangunan. Hal ini membuat banyak pakar lingkungan serta para pemerhati lingkungan menganggap bahwa USACE tidak melakukan tinjauan yang memadai dan kurang detil. Sebab, pembangunan jalur pipa DAPL jika sesuai dengan rute yang diajukan akan melewati Sungai Missouri, Sungai Cannon Ball dan Danau Oahe dan ketiganya merupakan sumber air utama bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya. Risiko pembangunan pipa terlalu besar apalagi jika dipertimbangkan akan terjadinya kebocoran. Pembangunan pipa ini sendiri akan mengakibatkan peningkatan polusi udara yang diperkirakan mencapai 100 juta ton CO<sub>2</sub> dalam waktu setahun. Jika terjadi kebocoran, maka sumber air utama milik suku Standing Rock Sioux tidak dapat diselamatkan. Air yang sudah terkontaminasi membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang banyak untuk menghilangkan racun didalamnya. Sungai yang tercemar juga akan mempengaruhi kehidupan didalamnya, ikan serta tumbuhan yang tumbuh disana akan terkontaminasi. Sungai merupakan sumber air serta sumber makanan bagi suku Sioux, jika keduanya hilang maka kualitas hidup mereka akan berkurang secara signifikan.

Permasalahan lainnya muncul ketika rute ini diungkapkan ke publik karena negara bagian Dakota merupakan tempat tinggal masyarakat asli Amerika, *Standing Rock Sioux tribes*. Suku Standing Rock mengatakan bahwa DAPL akan mengambil lahan milik mereka dan membuat sumber air minum mereka berisiko terkena cemaran jika jalur pipa DAPL rusak. Mereka beranggapan bahwa jika konstruksi pipa ini dilanjutkan artinya pemerintah Amerika Serikat akan melanggar perjanjian *Fort Laramie Treaty 1868* yang menjamin bahwa suku Indiana dapat tinggal di tanah reservasi tanpa terganggu. Selain itu, dilanjutkannya rute DAPL artinya melanggar HAM masyarakat adat untuk mendapatkan air bersih dan kehidupan yang layak. Rute DAPL yang diajukan oleh *Energy Transfers* akan melewati Danau Oahe, hanya 500 meter dari Sungai Missouri, tempat tinggal suku Standing Rock

Sioux. Penduduk Standing Rock menyatakan bahwa pembangunan DAPL melanggar *Fort Laramie Treaty* yang menjamin penduduk tanah reservasi, dapat tinggal dan menggunakan wilayah mereka tanpa gangguan dari pihak manapun. Selain itu, Sioux menyatakan bahwa rute jalur pipa ini akan melewati situs suci bagi mereka. Bagi suku Sioux yang menganut animisme, tanah yang akan dilewati oleh rute DAPL adalah tanah suci yang biasa mereka gunakan untuk beribadah. Salah satu tokoh Standing Rock Sioux, Floris White Bull, dalam satu wawancaranya dengan *The Guardian* menyatakan “*Those are our Eiffels, our pyramids.*” Menunjukkan betapa pentingnya tanah tersebut bagi para leluhur serta masyarakat Sioux. Jika pembangunan dilanjutkan, maka artinya pemerintah akan melanggar *National Historic Preservation Act* (NHPA) yang merupakan undang-undang perlindungan situs sejarah Amerika Serikat. Air dan tempat tinggal yang layak merupakan salah dua dari kebutuhan hidup manusia yang mendasar, hal ini juga sudah tertera dalam UDHR pasal 3 yang di dalamnya berbunyi setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu. Sudah banyak protes yang dilakukan baik oleh penduduk asli (*Standing Rock Sioux*) maupun organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan lingkungan. Pada prosesnya juga banyak terjadi pelanggaran atas HAM dan hukum internasional dimana para polisi dan militer melemparkan gas air mata, berlaku secara keji dan melukai para demonstran damai (Levin, *Dakota Access pipeline protests: UN group investigates human rights abuses*, 2017).

Jurnal ini akan menjelaskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh *Amnesty International* sebagai INGO yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dalam kasus *Dakota Access Pipeline* di Amerika Serikat yang sedang marak dibicarakan saat jurnal ini ditulis dan atau diterbitkan. Jurnal ini akan mengambil sisi argumentatif yang dikuatkan dengan pendapat ahli dan pengamat serta akan diperkuat dengan pernyataan dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini dan buku bahwa NGO merupakan aktor yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam lingkup negosiasi internasional. Dengan pendukung yang tersebar dari berbagai negara dan upaya-upaya pendukungnya untuk membantu penduduk asli Amerika, organisasi *Amnesty International* menindaklanjuti kasus *Dakota Access Pipeline*.

Namun pergantian presiden Amerika Serikat, dari Barack Obama ke Donald Trump, sebagaimana yang diketahui memiliki watak dan cara kepemimpinan yang berbeda dari presiden AS yang sebelumnya, motif-motif pemerintah dan korporasi dibalik pembangunan jalur pipa *Dakota Access Pipeline* serta banyaknya perubahan pada politik pemerintahan AS

menjadi salah satu hambatan bagi *Amnesty* dalam menyukseskan kampanye mereka. Bagaimana cara *Amnesty International* melakukan upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Amerika Serikat pada kasus *Dakota Access Pipeline* yang tidak hanya merugikan penduduk asli namun juga berpeluang untuk memperburuk perubahan iklim inilah yang akan dibahas pada jurnal ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis karya tulis ini adalah metode kualitatif yang bersifat eksplanasi. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang memiliki paradigma fenomenologi, sehingga proses penelitiannya lebih menekankan pada analisa fenomena tertentu, termasuk fenomena hubungan internasional. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan analisis data sekunder yaitu melalui publikasi/buku, internet atau media lainnya, termasuk persyaratan yang perlu dipenuhi.

## **JANGKAUAN PENELITIAN**

Jangkauan penelitian pada karya tulis ini adalah pengaruh organisasi non-pemerintah *Amnesty International* pada pembuatan kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam kasus *Dakota Access Pipeline*. Serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh AI dengan bersatu bersama *Standing Rock* untuk memberhentikan pembangunan akses pipa dakota yang mengancam kerusakan lingkungan di sekitar tempat konstruksi. Penelitian ini dilakukan dengan analisis menggunakan teori *empowerment at the grassroots* dan *productive power*. Mengacu pada jangkauan penelitian tersebut, penulis membatasi tahun penelitian yaitu pada tahun 2016 hingga tahun 2018.

## **ANALISIS DAN HASIL**

*Energy Transfer* (ET) merupakan perusahaan transportasi gas alam dan pipa propana A.S. Fortune yang memiliki kantor pusat di Dallas, Texas. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1995 oleh Ray Davis dan Kelcy Warren ini merupakan salah satu perusahaan kemitraan paling besar dengan investasi yang beragam di AS, menurut klaim dari perusahaan ET sendiri. Perusahaan ini telah membangun dan berinvestasi pada banyak jalur pipa yang tersebar di seluruh penjuru AS, seperti *Rover Pipeline* yang terbentang dari *West Virginia*, *Eastern Ohio* hingga *Western Pennsylvania*, *Bayou Bridge Pipeline* di *Nederland, Texas* dan saat ini telah menyelesaikan proyek kerjasamanya yang terbaru dengan beberapa perusahaan lain yaitu *Bakken Pipeline*.

*Bakken pipeline* yang baru saja terselesaikan pada pertengahan tahun 2017 ini merupakan sistem pipa yang mencakup dua jalur pipa yaitu *Dakota Access Pipeline* atau yang biasa disingkat menjadi DAPL dan *Energy Transfer Crude Oil Pipeline* atau ETCOP. Proyek ini merupakan kelanjutan dari proyek saluran pipa *Keystone XL* yang telah berjalan lebih dahulu di Amerika Utara dan sudah mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juni 2017. Proyek pipa senilai US \$3,8 miliar ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2014, namun konstruksinya baru dimulai pada Mei 2016. Sebagai proyek yang masif dan membutuhkan banyak biaya, *Bakken pipeline* diselesaikan dengan kerjasama beberapa perusahaan seperti *Energy Transfer Partners* yang memiliki kepemilikan paling besar dengan jumlah 38,25 persen, MarEn Bakken Company LLC ("MarEn") dengan bunga 36,75 persen, dan Phillips 66 Partners dengan bunga 25 persen (Energy Transfer, 2017). Jalur pipa yang membentang sepanjang 3000 kilometer (km) ini mengangkut minyak mentah yang diproduksi dalam negeri dari area produksi Bakken di Dakota Utara ke pusat penyimpanan dan terminal pemberhentian di Patoka, Illinois dan atau ke terminal tambahan di Nederland, Texas. Dakota Access akan terhubung dengan pipa lain yang akan mengangkut minyak ke terminal dan kilang di sepanjang Teluk Meksiko.

*Dakota Access Pipeline* (DAPL) adalah cara paling aman mengangkut minyak mentah dari sumur minyak hingga jatuh ke tangan konsumen Amerika, jalur pipa ini juga merupakan cara yang paling ramah lingkungan dan menelan biaya yang lebih sedikit pula daripada menggunakan alat transportasi lainnya seperti kereta atau truk. Mengangkut minyak mentah melalui pipa umumnya lebih murah daripada dengan kereta api yang membutuhkan biaya sekitar \$10 hingga \$15, dan jalur pipa hanya membutuhkan biaya US\$5 per barel menurut *Congressional Research Service*. Namun kereta api menawarkan keuntungannya sendiri karena jauh lebih cepat daripada menggunakan pipa. Mengangkut minyak dari Bakken di North Dakota ke Gulf Coast bisa memakan waktu lima hingga tujuh hari dengan kereta api, dibandingkan dengan pengangkutan menggunakan pipa yang memakan sekitar 40 hari waktu pengiriman.

Data statistik yang diterbitkan oleh Forbes pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 70% minyak mentah dan gas petroleum yang diproduksi Amerika Serikat dibawa dengan menggunakan jalur pipa sedangkan 23% diangkut dengan tank atau melalui jalur laut. Sedangkan truk dan kereta api hanya digunakan masing-masing 4% dan 3% dengan angka kebocoran yang lebih tinggi dari pengangkutan melalui jalur pipa (Forbes, 2014). Minyak mentah adalah material yang sangat destruktif jika bocor dapat menyebabkan perubahan sementara seluruh ekosistem karena komponen kimia yang berada dalam kandungan minyak

tersebut. Tidak hanya lingkungan, kebocoran juga sangat berpengaruh bagi manusia atau hewan yang terkena karena minyak mentah karena racun yang terkandung didalamnya.

*Energy Transfer* dengan tujuan untuk tidak membiarkan hal-hal di atas terjadi dan untuk tetap memenuhi permintaan pasar Amerika yang terus membutuhkan minyak mentah untuk diproses dan kemudian diekspor, membangun jalur pipa DAPL yang diklaim akan menjadi paling aman dan paling berteknologi maju di dunia. Proses pembangunan jalur pipa ini melibatkan peninjauan yang matang dan persetujuan dari USACE serta Angkatan Darat yang berada di Dakota Utara, Dakota Selatan, Iowa, dan Illinois.

Pembangunan jalur pipa Bakken ini telah menarik perhatian, tidak hanya pada masyarakat Amerika Serikat tapi juga masyarakat dunia selama proses konstruksinya daripada pembangunan jalur-jalur pipa yang sebelumnya karena menimbulkan banyak kontroversi. Salah satu pembangunan sistem pipa Bakken, jalur pipa Dakota Access atau DAPL, sempat mengalami keterlambatan karena izinnya tidak diterima pada pemerintahan Obama dan baru mendapatkan izin untuk melanjutkan konstruksi ketika Donald Trump diangkat sebagai presiden Amerika Serikat. *U.S Army Corps of Engineers* (USACE) pada pemerintahan Obama menolak izin pembangunan jalur DAPL setelah asosiasi suku *Standing Rock Sioux* (*Sioux*) memasukkan komplain resmi mengenai pembangunan jalur DAPL. *Sioux* menyebutkan bahwa pembangunan jalur pipa ini melanggar Pasal II *Fort Laramie Treaty*, yang menjamin penduduk tanah reservasi, dapat tinggal dan menggunakan wilayah mereka tanpa gangguan dari pihak manapun. Suku *Standing Rock Sioux* merupakan penduduk asli Amerika (suku Indiana) yang bermukim di negara bagian Dakota Utara dan Dakota Selatan.

Pembangunan jalur pipa DAPL di tempat bernama *Lake Oahe*, yang berjarak hanya 500 meter dari Sungai Missouri, dianggap sangat membahayakan sumber air utama masyarakat Indian yang tinggal di tanah reservasi sebab kebocoran minyak sangat mungkin terjadi. Tidak hanya itu, konstruksi ini juga akan menggali tanah yang merupakan area suci bagi suku *Standing Rock*. Selain alasan-alasan tersebut, pihak ET serta pemerintah Dakota Utara tidak berkonsultasi dengan suku *Sioux* atas pembangunan jalur pipa ini yang juga merupakan bentuk pelanggaran perjanjian yang sudah dibuat.

Berdasarkan komplain yang telah diajukan oleh *Standing Rock* dan setelah melalui pertimbangan atas tuduhan pelanggaran *Fort Laramie Treaty*, akhirnya pada tanggal 4 Desember 2016, USACE mengumumkan bahwa mereka tidak akan memberikan perizinan yang dibutuhkan oleh ET untuk membangun pipa dibawah danau. Seperti yang telah disyaratkan oleh *Mineral Leasing Act 30 U.S.C. § 185*, bahwa perijinan tanah federal yang dimiliki oleh Amerika Serikat kecuali tanah di Sistem Taman Nasional, tanah yang diberikan

untuk suku Indian, dan tanah di Outer Continental Shelf. Hak perizinan reservasi federal tidak akan diberikan jika Sekretaris Dalam Negeri atau kepala agensi memutuskan bahwa hal itu tidak sesuai dengan tujuan reservasi.

Sejak pembangunan DAPL dimulai, terhitung pada bulan Agustus 2016 hampir 300 pengunjung rasa telah ditangkap. Sementara protes sebagian besar telah damai, terjadi kekerasan antara pengunjung rasa dan polisi. Termasuk pada 27 Oktober 2016 ketika polisi menggunakan semprotan merica dan granat untuk memaksa pengunjung rasa keluar dari rute pipa. Demo dimulai atas kekecewaan masyarakat terhadap USACE yang melanggar undang-undang pelestarian lingkungan (*National Environmental Policy Act* (NEPA)) dan bersejarah (*National Historic Preservation Act of 1966* (NHPA)), dengan fokus pada keputusan untuk mengalihkan rute pipa dari Bismarck, North Dakota ke ambang pintu reservasi Standing Rock tanpa analisis dan konsultasi lingkungan yang memadai.

Proposal pengajuan *Dakota Access Pipeline* (DAPL) sebenarnya sudah ditentang oleh berbagai pihak seperti para politisi yang memiliki jabatan tinggi, kelompok penduduk asli Amerika yang memiliki kepentingan langsung dalam pembangunan jalur pipa, hingga aktivis lingkungan, seperti Sierra Club, yang menentang penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangunan infrastruktur. Pada tanggal 27 Juli 2016, Suku Standing Rock Sioux mengajukan permintaan bantuan dan ganti rugi pada pengadilan federal. Keluhan tersebut berargumen bahwa perizinan yang dilakukan USACE atas DAPL artinya Korps tidak mematuhi NHPA. Selain itu artinya Korps juga melanggar *Clean Water Act* dan NEPA jika menyetujui pembangunan pipa di bawah Sungai Missouri serta mengizinkan perusahaan pipa tersebut membuang limbah ke sungai ataupun perairan di sekitar Sungai Missouri yang berarti akan secara langsung mencemari sumber air yang berada di tanah leluhur suku Standing Rock Sioux. Pada tanggal 4 Agustus, Standing Rock meminta hukum penetapan sementara (*preliminary injunction*), yang mengharuskan Korps untuk menarik kembali izin di bawah Nationwide Permit 12.

Sementara suku Standing Rock berjuang tanpa tanggapan yang berarti dari pemerintah Amerika Serikat, para aktivis lingkungan dan HAM mulai mendengar kabar ini dan bergerak untuk membantu mereka. Organisasi-organisasi seperti Amnesty International dengan basis HAM dan Green Peace International yang berbasis lingkungan pun gencar menyuarakan penolakan mereka terhadap konstruksi DAPL dengan *concern* mereka masing-masing.

### **1.1 Amnesty Internasional Melakukan *empowerment* pada Komunitas Lokal dalam Pembangunan DAPL**

Sungai Missouri adalah tempat yang suci bagi Suku Standing Rock, tidak hanya karena sungai merupakan sumber air minum dan sumber makanan bagi mereka namun sejak ratusan tahun yang lalu sungai adalah tempat mereka melakukan ritual. Komunitas asli Standing Rock, yang bertempat tinggal di North Dakota, telah memprotes mengenai jalur pipa ini selama dua tahun sejak rute ulang dirilis. Selama ini sebagian besar liputan media menggambarkan protes sebagai gerakan lingkungan namun diskusi mengenai agama dan adat jarang disorot. Lebih dari 5.000 tahun yang lalu, penduduk sebuah desa di sepanjang Green River, Kentucky, melakukan ritual yang dinamakan Cult of the Keeper River. Kerangka yang ditemukan di Kentucky menunjukkan bukti adanya pertumbuhan jaringan tulang rawan di tulang telinga pada manusia yang berulang kali terkena air dingin — menunjukkan bahwa mereka kerap melakukan upacara keagamaan di sungai. Hari ini budaya suku asli Amerika di Midwest dan selatan menganggap sungai adalah entitas suci dan lebih dikenal sebagai Long Man atau Long Snake. Bagi Standing Rock, pertarungan pipa Dakota Access Pipeline bukan hanya soal tanah mereka yang hilang namun juga mengenai tradisi keagamaan.

Pengusuran budaya dan komunitas lokal yang berada di jalur DAPL bukanlah sesuatu yang baru bagi para masyarakat asli Indiana. DAPL hanyalah satu dari puluhan contoh penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah federal yang semena-mena dalam memperlakukan suku asli Amerika. Seorang petinggi ET bahkan menyatakan bahwa beberapa studi arkeologi yang dilakukan dengan kantor pelestarian bersejarah negara bagian tidak menemukan adanya benda suci di sepanjang rute. Padahal sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, sungai adalah tempat sucinya, tempat sakral dimana masyarakat Sioux melakukan ritual.

Dalam kasus DAPL, pemerintah menggunakan Nationwide Permit 12 sebagai pembenaran dibangunnya jalur pipa ini tanpa melakukan tinjauan yang cukup. Alih-alih memeriksa secara luas dampak yang dimiliki oleh pipa besar di sepanjang rutanya, dengan melihat efek yang besar pada air, kualitas udara, tanah dan spesies hewan atau emisi yang mengubah iklim yang dapat disebabkan oleh pembangunan pipa, Korps hanya menilai pipa besar sebagai serangkaian yang jauh lebih kecil, memecahnya menjadi segmen untuk ditinjau di lokasi air dan lahan basah tertentu.

Sejak menggunakan NWP 12 untuk mengizinkan pembangunan Gulf Coast Pipeline pada 2012, Korps telah mengizinkan beberapa jalur pipa utama lainnya dengan izin yang sama. Misalnya seperti, empat kantor distrik Korps telah memberikan perijinan pada jalur

pipa minyak di South Flanagan sepanjang 600 mil yang melalui 1.950 saluran air di empat negara bagian di bawah NWP 12, tanpa pemberitahuan publik atau ulasan NEPA atau CWA khusus proyek. Sedangkan baru-baru ini, Korps telah memverifikasi 1.168 mil Dakota Access Pipeline melalui North Dakota, South Dakota, Iowa, dan Illinois menggunakan NWP 12 juga tanpa tinjauan risiko yang memadai. Contoh-contoh tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan NWP 12 yang seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghancurkan situs-situs bersejarah. Para pemerhati lingkungan seperti Sierra Club, National Wildlife Federation mengatakan bahwa NWP tidak pernah dimaksudkan untuk mengotorisasi mempengaruhi proyek-proyek infrastruktur pipa besar-besaran dan bahwa izin otoritas seharusnya tidak ada lagi. Sebagai gantinya, mereka berpendapat bahwa agen-agen federal harus diminta untuk mengeluarkan Clean Water Act 404 dan tinjauan lingkungan yang lebih luas di bawah Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional (NEPA). Mereka berpendapat bahwa, NWP 12 dan ketentuan-ketentuannya memungkinkan persetujuan jaringan pipa utama tanpa peninjauan lingkungan khusus proyek atau proses peninjauan publik, seharusnya dihapuskan atas pertimbangan dari berbagai kasus pembangunan infrastruktur yang sudah terjadi.

Sioux Treaty pertama kali dibuat pada tahun 1851, salah satu isinya memberikan 12.500.000 hektar tanah untuk masyarakat adat. Hingga pada tahun 1910, pemerintah federal berturut-turut melanggar empat perjanjian dan saat ini hanya tersisa 640.000 hektar tanah reservasi. Sejak tahun 1940-1970-an pembangunan infrastruktur secara masif membuat keberadaan penduduk pribumi semakin tergeser. Yang lebih disayangkan lagi, sering kali pembangunan menargetkan pengusuran tanah (milik masyarakat adat) dan tempat-tempat suci mereka. Dua tanah reservasi terbesar di North Dakota dipilih sebagai reservoir dengan Garrison Dam mengalir 153.000 hektar properti suku asli Indiana, sementara Lake Oahe mengalir 200.000 hektar tanah Standing Rock Sioux Reservation. Banyak keluarga (dari masyarakat adat) yang kehilangan rumah, sekolah, dan infrastruktur dibiarkan begitu saja tanpa jalan, air yang mengalir maupun makanan. Mereka terus menunggu kompensasi layak dari pemerintah yang tidak kunjung diberikan. Salah satu akademisi terkenal di Amerika, Vine Deloria Jr yang berasal dari Standing Rock mengatakan bahwa program pembangunan bendungan itu adalah satu-satunya tindakan yang paling merusak yang pernah diabadikan pada suku apapun oleh Amerika Serikat.

Seluruh pembangunan infrastruktur memerlukan persetujuan oleh USACE yang harus melewati *National Historic Preservation Act* (NHPA). Disahkan menjadi undang-undang pada tahun 1966, NHPA disahkan setelah Perang Dunia II, ketika masa depan Amerika mengancam masa lalunya yang tak tergantikan. Perluasan infrastruktur Amerika seperti jalan

raya, bendungan, jaringan listrik dengan cepat menghancurkan situs arkeologi kuno, kuburan dan bangunan bersejarah. Dengan NHPA, Kongres menyatakan bahwa pelestarian warisan bersama Amerika adalah untuk kepentingan umum. Pertikaian antara penduduk asli Amerika di Dakota Utara dan pengembang proyek pipa minyak dan pasukan polisi telah menginspirasi protes di seluruh negeri. Saat mempertimbangkan upaya baru, sejumlah efek pada properti bersejarah harus dipertimbangkan: *direct* (seperti kerusakan fisik), *indirect*, jangka pendek, jangka panjang, atau kumulatif (seperti bagaimana satu pipa mungkin tidak membahayakan sebuah situs, tetapi mungkin selusin dari mereka bisa membahayakan). NHPA tidak menjamin pelestarian. Tapi Undang-Undang ini mensyaratkan bahwa pembuat keputusan harus menyeimbangkan kepentingan Amerika dalam pembangunan dengan kebutuhan untuk menghormati sejarah asli mereka.

Selama bertahun-tahun, penduduk asli Amerika hanya memiliki sedikit peluang untuk menyampaikan opininya pada proyek-proyek pembangunan besar seperti DAPL. Tetapi pada tahun 1992, Kongres mengubah NHPA untuk secara resmi memasukkan properti budaya tradisional. Ini adalah tempat-tempat yang, karena hubungannya dengan praktik budaya asli Amerika atau kepercayaan komunitas yang hidup, "berakar dalam sejarah komunitas itu" dan "pentingnya menjaga identitas budaya komunitas yang berkelanjutan." Amandemen tersebut mengarahkan badan-badan federal, dalam melaksanakan tanggung jawab mereka di bawah NHPA, untuk berkonsultasi dengan suku-suku Indiana yang mementingkan agama dan budaya di tempat-tempat suci ini. Sehingga pemerintah federal dan suku-suku Indiana sebagai penduduk asli Amerika dapat memajukan Amerika dengan seimbang.

Masyarakat adat sudah secara terbuka membicarakan mengenai situs sejarah dan sakral milik, namun Standing Rock terus di-*frame* oleh media sebagai protes lingkungan atau alternatif untuk Occupy Wall Street. Sebagai upaya untuk didengar, komunitas penduduk asli Amerika meluncurkan platform media seperti Indian Country Media Network, membuat video YouTube serta film dokumenter berdurasi panjang mengenai Oceti Sakawin, dan menggunakan platform media sosial untuk menjangkau publik. Namun demikian, karena kurangnya media diskusi internasional tentang agama asli, masyarakat kurang memahami dan bagaimana pipa berdampak pada tempat-tempat suci mereka. Lagi-lagi, budaya masyarakat adat tergerus karena pembangunan infrastruktur. Penargetan nasional tempat-tempat keagamaan, bersama dengan pembantaian (Pembantaian Whitestone Hill, yang menewaskan lebih banyak warga sipil daripada Wounded Knee, terjadi di sebelah timur Standing Rock), pemindahan paksa dan pendidikan ulang (juga secara paksa) bagi anak-anak komunitas adat

telah membuat masyarakat adat tidak lagi memercayai pemerintah. Ketika saluran pipa dialihkan dari Bismarck, diikuti oleh pengabaian penilaian pelestarian lingkungan dan sejarah yang diamanatkan, masyarakat adat merasa Korps Angkatan Darat mengulangi tindakan-tindakan saat proyek bendungan bendungan dijalankan beberapa tahun silam.

Penelitian ini berargumen bahwa Amnesty International merupakan organisasi dengan tipe *empowerment at the grassroots* yang dikemukakan oleh Phillip Eldridge dimana NGO dengan tipe ini bekerja sebagai penggerak masyarakat agar memperjuangkan hak-haknya sendiri. Selain itu, AI juga kerap menjadi organisasi berperan sebagai “suara” bagi masyarakat yang tidak didengar oleh pemerintah. Dalam kasus DAPL, riset yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Amnesty International telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan proyek ini. AI telah memobilisasi ribuan orang untuk memanggil pejabat lokal dari negara bagian untuk menuntut agar mereka melindungi hak asasi setiap orang. AI juga meminta pemerintah federal untuk menghentikan proyek DAPL dan menyelidiki klaim kepolisian yang menyudutkan pihak masyarakat adat. Salah satunya dengan mengirimkan surat-surat kepada para petinggi pemerintah. Mulai dari mengirimkan surat terbuka kepada pemerintah lokal Morton County Sheriff United States, hingga kepada pemerintah federal *United States Department of Justice* dan presiden Barack Obama. Amnesty menunjukkan kekhawatirannya kepada berbagai pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian pada proses pembangunan DAPL serta bagaimana pembangunan ini sendiri adalah suatu pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang telah ditetapkan pada perjanjian Fort Laramie tahun 1868. Penelitian ini menunjukkan bahwa AI, sebagai *mobilization NGO* berpihak sebagai penggerak antara pihak Standing Rock Sioux dan pemerintah.

## **1.2 Kekuatan Amnesty International dalam Penghentian DAPL**

Penangkapan demonstran, yang melabel diri mereka sebagai “*water protectors*”, telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir dan penegakan hukum telah menggunakan tanggapan yang lebih militeristik terhadap protes dan perkemahan di dekat lokasi konstruksi Pipa Akses Dakota. Masyarakat adat setempat mengatakan saluran pipa membahayakan pasokan air mereka dan menodai tanah suci. Minggu ini, penangkapan terjadi di sebuah kamp yang baru-baru ini didirikan di tanah pribadi yang *federally-recognized* yang berada didekat lokasi konstruksi.

Sejak awal kasus ini muncul, Amnesty International USA (AIUSA) telah mengamati bagaimana pembangunan pipa DAPL akan berjalan. Amnesty Internasional pada bulan

Agustus 2016 memutuskan untuk menerjunkan beberapa delegasi pengamat hak asasi manusia untuk terjun langsung ke Standing Rock Sioux dan memantau respon polisi terhadap demo yang dilakukan oleh para demonstran. Sejak protes berlangsung, AI juga telah mendokumentasikan banyak contoh penyalahgunaan kekuatan yang berlebihan dan intimidasi oleh polisi serta tuduhan kriminal pada demonstran.

Amnesty International sebagai organisasi internasional yang berfokus pada mengkampanyekan HAM telah memiliki cabang di 120 negara dan lebih dari 7 juta pendukung, seringkali dianggap sebagai organisasi yang memiliki kekuatan politik besar. Karena anggapan tersebut, pembahasan mengenai Amnesty International tidak terlepas dari kekuatan organisasi ini terhadap isu-isu HAM dunia.

Kekuasaan atau kekuatan produktif (*productive power*) adalah salah satu taksonomi kekuasaan yang diperkenalkan oleh Barnett dan Duvall. Barnett dan Duvall memberikan definisi kekuasaan sebagai berikut, “*Power is the production, in and through social relations, of effects on actors that shape their capacity to control their fate.*” Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua dimensi analitis yang penting. Dimensi analitis pertama menyangkut tentang jenis-jenis relasi sosial dimana kekuasaan bekerja. Terdapat dua bentuk relasi sosial dalam dimensi ini yaitu hubungan “interaksi” antar aktor yang telah terbentuk sebelumnya dan hubungan “konstitutif” sebagai aktor dalam kehidupan sosial. Sedangkan dimensi analitis yang kedua menyangkut tentang perbedaan relasi sosial dari “interaksi” atau “konstitutif” dimana kekuasaan bekerja, secara langsung dan spesifik, atau tidak langsung dan tersebar (Barnett & Duvall, 2005).

Perbedaan-perbedaan yang dihasilkan oleh dimensi analitis tersebut kemudian menghasilkan taksonomi kekuasaan meliputi: *compulsory*, *institutional*, *structural*, dan *productive*;

Tabel 3.1

## Taksonomi kekuasaan

		Relational specificity	
		Direct	Diffuse
Power works Through	Interaction of specific actors	Compulsory	Institutional
	Social Relations of Constitution	Structural	Productive

Kekuasaan produktif terjadi karena proses sosial yang konstitutif dan tidak terjadi karena proses interaksi antar aktor. Kekuasaan produktif merupakan kekuasaan yang bekerja melalui pembentukan keseluruhan subjek sosial dengan berbagai kuasa sosial yang dilakukan dengan sistem pengetahuan dan praktik- praktik diskursif yang mencakup jangkauan sosial yang luas. Dengan demikian, kekuasaan produktif melihat bahwa kapasitas sosial pada aktor diproduksi melalui proses sosial yang konstitutif yang kemudian membentuk pemahaman dan kepentingan para aktor.

Kekuasaan produktif menekankan pentingnya diskursus, proses sosial dan sistem pengetahuan dimana hal tersebut dihasilkan, ditetapkan, dihidupi, dirasakan, dan ditransformasikan dalam kehidupan sosial kekuasaan produktif, diskursus adalah bentuk dari relasi sosial dari kekuasaan karena hal tersebut terjadi dalam kehidupan sosial. Proses dan praktik diskursif tersebut juga menghasilkan identitas dan kapasitas sosial. Proses dan praktik tersebut memberikan makna kepada identitas dan kapasitas sosial. Hal tersebut pada akhirnya bermuara pada asimetri kapasitas sosial yang dimiliki oleh aktor internasional.

Karena proses diskursus yang terbentuk secara sosial tersebut, tidak jarang ditemukan bahwa Amnesty International harus memikul tanggung jawab tertentu, seperti harus membantu korban pelanggaran HAM dan menyuarakan pelanggaran tersebut agar menjadi sebuah isu internasional, meskipun pada dasarnya tanggung jawab tersebut bukan hanya diberikan kepada AI saja. Namun, karena proses sosial dan praktik diskursif tersebut menyebabkan pembentukan identitas dan pembedaan kapasitas sosial aktor sehingga menempatkan Amnesty International dalam tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, kekuasaan produktif bekerja menghasilkan identitas tertentu bagi Amnesty International sebagai organisasi dengan kekuatan politik yang bertanggung jawab atas kasus-kasus pelanggaran HAM.

Pada kasus ini, Amnesty telah mengirimkan surat-surat kepada Divisi Patroli North Dakota dan kantor Morton County Sheriff yang berisikan AIUSA meminta agar penghalang jalan ke lokasi protes dilepaskan, mendesak pihak berwenang untuk bertemu secara teratur dengan pengunjuk rasa dan pemimpin masyarakat, dan mengingatkan para pejabat tugas mereka untuk memfasilitasi protes damai. Selain itu, surat juga telah dilayang kepada Gubernur Republik Doug Burgum dan Jaksa Agung Wayne Stenehjem untuk membatalkan

atau mempertimbangkan dakwaan yang jatuh pada demonstran tertangkap. Surat itu juga meminta mereka untuk meninjau praktik polisi dan membuka penyelidikan independen terhadap beberapa kasus. Polisi mengatakan bahwa beberapa pemrotes ikut andil dalam kerusuhan serta melakukan kekerasan, maka polisi melakukan hal yang sama sebagai *act of self-defense*.

Sementara itu, AI juga telah memobilisasi ribuan orang untuk memanggil pejabat lokal dari negara bagian untuk menuntut agar mereka melindungi hak asasi setiap orang. AI juga meminta pemerintah federal untuk menghentikan proyek DAPL dan menyelidiki klaim kepolisian yang menyudutkan pihak masyarakat adat. Amnesty International memiliki *background* yang kuat dalam memastikan jalannya pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya selalu patuh pada standar hak asasi manusia internasional yang sesuai dengan UDHR. Kampanye dan petisi penolakan pembangun jalur pipa DAPL juga dilakukan secara masif oleh AI. Setelah mengirim delegasi pengamat hak asasi manusia untuk memantau kondisi protes, Amnesty International USA hari ini meminta pemerintah negara bagian dan lokal untuk mengambil langkah-langkah spesifik guna melindungi hak masyarakat adat untuk memprotes secara damai di lokasi pipa yang disengketakan di Dakota Utara.

Merespon surat yang telah dikirim langsung oleh Amnesty International kepada presiden berisikan urgensi untuk menghentikan konstruksi dan bagaimana pemerintah telah melanggar beberapa Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh dunia internasional, akhirnya pemerintahan Obama merespon pada 14 Desember 2016. Korps Insinyur Angkatan Darat akan menghentikan pembangunan Pipa Akses Dakota di bawah Sungai Missouri di dekat Reservasi Standing Rock Sioux sampai keputusan final tinjauan lingkungan dikeluarkan. Hal ini adalah kemenangan sementara bagi suku asli Indiana dan aktivis-aktivis yang andil dalam protesnya.

Pemberhentian sementara untuk merute ulang jalur pipa merupakan salah satu contoh kekuasaan yang dimiliki oleh Amnesty International dalam pembentukan *discourse*. AI menggunakan kekuatannya sebagai organisasi HAM internasional yang selalu menyuarakan perihal ini dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan HAM. Melalui kampanye-kampanye serta petisi yang dilakukan oleh AI pada situs web organisasi dan sosial mediana, AI berhasil membentuk sebuah wacana bahwa sedang terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh perusahaan Energi Transfers pada suku Standing Rock Sioux. Air dan kehidupan yang layak merupakan hak semua manusia dan perusahaan ini mengambil hak itu.

Penulis menyatakan bahwa lebih banyak humanitarisme daripada idealisasi dan citra proyek dalam suatu pembentukan wacana. Amnesty International lebih proaktif dalam memobilisasi sumber daya secara kolektif dan memaksimalkan penggunaan pada media untuk membentuk agenda. Kekuasaan AI dibentuk melalui hubungan sosial secara global, proses sosial yang secara struktural dibentuk dan diproduksi secara diskursif yang memungkinkan Amnesty International berperilaku hegemon.

## KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan pada skripsi ini menunjukkan bahwa Amnesty Internasional mampu membuat suatu wacana dan menjadikan hal tersebut sebagai agenda hingga masyarakat dunia menyadari akan terjadinya isu HAM ini dan ikut turun tangan dalam protes atas DAPL. Dalam kasus ini, Amnesty International telah melakukan apa yang disebut oleh Margaret Keck pada bukunya *Activists beyond borders; Advocacy Networks in International Politics*, sebagai *issue creation* dan *agenda setting*. Seperti yang dikemukakan oleh Keck, dimana organisasi internasional non-pemerintah mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah dengan cara membentuk isu dan mempengaruhi publik, hal ini dilihat oleh Barnett dan Duvall sebagai kekuatan produktif.

Amnesty International, berbagai organisasi non-pemerintah lainnya yang berdasar HAM dan lingkungan, telah bekerjasama hingga saat ini untuk menghentikan pembangunan jalur DAPL. Walaupun protes ini sempat didengar oleh pemerintah dengan melakukan penghentian sementara pada konstruksi untuk mengambil rute baru agar tidak melintasi tanah suci milik Standing Rock Sioux, perubahan pemerintahan memengaruhi pengambilan keputusan mengenai hal ini. Perbedaan yang signifikan terlihat pada cara kepemimpinan presiden Barack Obama dan Donald Trump. Pada masa kepemimpinannya, Obama melakukan upaya-upaya untuk mendengarkan opini dari seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, ras, maupun agama. Hal ini juga dapat dilihat ketika presiden Obama pada *Tribal Conference* menyatakan dukungannya kepada suku-suku Indiana yang tengah melakukan protes untuk mendukung Standing Rock Sioux Tribe. Sementara administrasi pada pemerintahan Donald Trump, memiliki tujuan yang berbeda dari administrasi dibawah pemerintahan Obama. Empat hari setelah menduduki *White House*, Trump menandatangani persetujuan untuk pembangunan jalur pipa Dakota Access Pipeline. Tidak hanya itu, Trump juga mengeluarkan tindakan eksekutif yang menyatakan jalur pipa minyak yang dibangun di AS harus dibangun dengan bahan-bahan dari Amerika Serikat, memudahkan proses pengaturan untuk konstruksi pipa serta memperpendek proses tinjauan lingkungan.

Dari seluruh temuan akademik yang sudah dipaparkan pada penjelasan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa saat ini *Non-Governmental Organization*, seperti Amnesty International telah menjadi aktor yang berpengaruh pada politik internasional. Hal ini sangat relevan bagi studi hubungan internasional yang terus berkembang, NGO telah menjadi aktor diplomasi yang baru dengan kekuatannya untuk membangun diskursus sesuai dengan latar belakangnya masing-masing.

## REFERENCES

- Forsythe, D. P. (2012). *Human rights in international relations* (Vol. III). Cambridge: Cambridge University Press.
- Levin, S. (2017). *Dakota Access pipeline: the who, what and why of the Standing Rock protests*. Retrieved April 8, 2017, from <https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/03/north-dakota-access-oil-pipeline-protests-explainer>
- Levin, S. (2017). *Dakota Access pipeline protests: UN group investigates human rights abuses*. Retrieved April 2017, from <https://www.theguardian.com/us-news/2016/oct/31/dakota-access-pipeline-protest-investigation-human-rights-abuses>
- Energy Transfer. (2017, December 17). "*Major Projects: BAKKEN*". Retrieved from Energy Transfers: [https://www.energytransfer.com/ops\\_bakken.aspx](https://www.energytransfer.com/ops_bakken.aspx)
- Forbes. (2014, April 26). *Pick Your Poison for Crude— Pipeline, Rail, Truck or Boat*. Retrieved from <https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2014/04/26/pick-your-poison-for-crude-pipeline-rail-truck-or-boat/#5420cf9217ac>
- Barnett, M., & Duvall, R. (2005). *Power in Global Governance*. Cambridge: Cambridge University Press.